



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1753);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki muatan:

- a. tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;;
- f. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pt. Kepala Biro Hukum

ABDUL HALIM ISKANDAR

Rully Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. PENGERTIAN UMUM

BAB II KERANGKA KERJA PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

- A. KERANGKA KERJA SPBE
- B. KETERKAITAN PETA RENCANA SPBE NASIONAL DENGAN PETA
RENCANA SPBE INSTANSI PUSAT
- C. KERANGKA KERJA PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE
- D. MUATAN PETA RENCANA SPBE

BAB III PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam mencapai tujuan yang sejalan dengan visi SPBE berupa terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan konteks strategis berupa deskripsi langkah dalam menerapkan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Deskripsi tersebut meliputi target capaian, program, serta kegiatan unit kerja yang dituangkan dalam bentuk Peta Rencana SPBE.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 13 hingga Pasal 19 tentang Peta Rencana SPBE, disebutkan bahwa Instansi Pusat perlu menyusun Peta Rencana Instansi Pusat dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat yang memuat 7 (tujuh) muatan dalam bentuk lampiran kegiatan SPBE. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bahwa tingkat kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat merupakan salah satu indikator penilaian SPBE untuk aspek Perencanaan Strategis SPBE dalam Domain Tata Kelola SPBE. Sehingga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menetapkan Peta Rencana SPBE Kementerian dengan Keputusan Menteri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah untuk mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Tujuan disusunnya Keputusan ini diantaranya adalah:
 - a. Peta Rencana SPBE diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka penerapan SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE diharapkan dapat mengintegrasikan program/kegiatan penerapan SPBE sehingga menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional;
 - c. Peta Rencana SPBE diharapkan dapat memandu perubahan lingkungan yang terjadi dalam melaksanakan penerapan SPBE.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Keputusan ini terbatas pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja dengan berisi muatan sebagai berikut:

1. tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;;
6. keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
7. audit teknologi informasi dan komunikasi.

D. PENGERTIAN UMUM

1. SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Peta Rencana Kementerian adalah dokumen yang mendeskripsikan langkah strategis dalam penyiapan dan implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi target capaian, program, serta kegiatan unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

KERANGKA KERJA PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di lingkungan Kementerian. Penyusunan Peta Rencana berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE dan Rencana Strategis Instansi Pusat.

A. KERANGKA KERJA SPBE

Kerangka kerja SPBE merupakan konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional hingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur-unsur SPBE mencakup:

1. rencana induk SPBE Nasional;
2. arsitektur SPBE;
3. peta rencana SPBE;
4. rencana dan anggaran SPBE;
5. proses bisnis;
6. data dan informasi;
7. infrastruktur SPBE;
8. aplikasi SPBE;
9. keamanan SPBE; dan
10. layanan SPBE.

Peta Rencana SPBE merupakan salah satu unsur SPBE yang bertujuan untuk memberikan mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE terdiri dari Peta Rencana SPBE Nasional, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Setiap Peta Rencana memiliki beberapa muatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE;
2. Manajemen SPBE;
3. Layanan SPBE;
4. Infrastruktur SPBE;
5. Aplikasi SPBE;
6. Keamanan SPBE; dan
7. Audit TIK.

B. KETERKAITAN PETA RENCANA SPBE NASIONAL DENGAN PETA RENCANA SPBE INSTANSI PUSAT

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat selaras dengan rencana strategis yang dimiliki oleh Instansi Pusat serta program dan kegiatan yang tertuang dalam Peta Rencana SPBE Nasional. Selain itu, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat juga memiliki keterkaitan dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Arsitektur SPBE merupakan acuan dalam penyelarasan 6 (enam) domain yang terdapat di dalamnya, sementara Peta Rencana SPBE

merupakan deskripsi dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung penyelarasan domain-domain tersebut.

C. KERANGKA KERJA PENYUSUNAN PETA RENCANA SPBE

1. Dokumen Strategis

Dalam penyusunan Peta Rencana SPBE, pemahaman mengenai sasaran yang telah ditetapkan dokumen strategis perlu dilakukan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin keselarasan antara indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan yang akan dijabarkan dalam dokumen Peta Rencana SPBE.

2. Analisa Kesenjangan Pencapaian Indikator Kinerja

Analisa kesenjangan dibutuhkan untuk melihat celah-celah perbaikan yang dapat dilakukan melalui program dan kegiatan pada Peta Rencana SPBE. Dalam analisa ini, dilakukan perbandingan antara target dan kondisi eksisting saat ini. Sehingga dapat ditemukan kesenjangan yang terjadi untuk dapat memberikan gambaran mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan. Tindak lanjut ini akan berkaitan juga dengan kondisi *as-is* (eksisting) dan *to-be* (target) Arsitektur SPBE. Rencana tindak lanjut inilah yang menjadi program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen Peta Rencana SPBE.

3. Konsolidasi Rencana Pengembangan dalam Peta Rencana SPBE dengan Rencana Kerja dan Anggaran.

Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pada Peta Rencana SPBE dapat terselenggara, maka diperlukan konsolidasi atau penyesuaian dengan Rencana Kerja dan Anggaran yang dimiliki oleh Instansi Pusat.

4. Pengembangan Peta Rencana SPBE

Dalam pengembangan dokumen Peta Rencana SPBE, terdapat beberapa bagian yang perlu disusun, yaitu Batang Tubuh dan Lampiran Peta Rencana SPBE. Dalam penyusunan lampiran Peta Rencana SPBE, terdapat beberapa langkah, yaitu:

a. Pengkategorian sesuai Muatan Peta Rencana SPBE

Setiap Peta Rencana memiliki 7 (tujuh) Muatan Peta Rencana sesuai amanat pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Penentuan Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan program perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Setiap program harus menyertakan UIC (*Unit in Charge*) atau unit yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya;
- 2) Setiap program harus menyertakan target pencapaian yang disesuaikan dalam kolom waktu (tahun); dan
- 3) Dalam 1 (satu) Muatan memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) program.

Sementara kegiatan yang dimaksud dalam Peta Rencana SPBE adalah kegiatan rinci yang akan dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program yang direncanakan. Dalam 1 (satu) Program memungkinkan terdapat lebih dari 1 (satu) kegiatan.

D. MUATAN PETA RENCANA SPBE

1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.

2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Dalam dokumen Peta Rencana SPBE harus melampirkan program dan kegiatan dari Manajemen SPBE berikut:

a. Manajemen Risiko SPBE

Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. Risiko SPBE merupakan peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan SPBE. Manajemen ini bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 46, muatan manajemen risiko terdiri atas identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Risiko SPBE yang telah diidentifikasi menjadi dasar pengendalian keamanan informasi SPBE.

b. Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen keamanan informasi merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi. Risiko SPBE yang telah diidentifikasi dalam penerapan manajemen risiko SPBE, menjadi dasar pengendalian keamanan informasi yang terbagi dalam 16 kategori, 7 dampak area.

c. Manajemen Data

Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data. Manajemen ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Penerapan Manajemen Data dilaksanakan selaras dengan kaidah kebijakan Satu Data Indonesia (Standar Data dan Interoperabilitas Data).

- d. **Manajemen Aset TIK**
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Muatan Manajemen Aset TIK meliputi perangkat lunak, perangkat keras. Dalam prosesnya, Manajemen Aset TIK terdiri atas perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak.
 - e. **Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)**
Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
 - f. **Manajemen Pengetahuan**
Manajemen Pengetahuan adalah proses mendokumentasikan pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE. Manajemen Pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
 - g. **Manajemen Layanan SPBE**
Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik agar layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Muatan Manajemen Layanan terdiri dari:
 - 1) Aktivitas layanan berupa pelayanan pengguna (pengaduan, permintaan dari pengguna SPBE) dan pengoperasian layanan yang dapat melingkupi pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur serta Aplikasi SPBE.
 - 2) Jenis layanan berupa layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
3. **Layanan SPBE**
Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
4. **Infrastruktur SPBE**
Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

5. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Aplikasi SPBE terpecah menjadi aplikasi umum dan aplikasi khusus.

6. Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Dalam penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

7. Audit TIK SPBE

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- a. Penerapan tata kelola dan manajemen TIK
- b. Fungsionalitas TIK
- c. Kinerja TIK yang dihasilkan
- d. Aspek Teknologi informasi dan Komunikasi lainnya

Dalam Audit TIK terdapat beberapa audit yang harus ada dalam dokumen Peta Rencana SPBE, yaitu:

- a. Audit Infrastruktur SPBE: untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- b. Audit Aplikasi: untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
- c. Audit Keamanan SPBE: untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara keamanan teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

BAB III

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dalam bentuk program dan kegiatan SPBE yang diterapkan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Lampiran Peta Rencana berisi 7 (tujuh) muatan, yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE meliputi program dan kegiatan dari tiap-tiap muatan, informasi terkait pihak yang bertanggung jawab (*Unit in Charge*), kondisi tahun sebelumnya yang menjadi dasar (*Baseline*) serta target untuk tahun mendatang. Tahun 2022 menjadi *baseline* dalam Peta Rencana SPBE Kementerian ini. Sementara itu, telah ditentukan target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2023-2024. Penentuan target tahun pada Peta Rencana SPBE mengikuti target tahun yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian. Rincian program dan kegiatan mengenai SPBE yang direncanakan akan dilaksanakan pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Peta Rencana SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2023-2024

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
1	Tata Kelola					
	A	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE				
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Manajemen Data	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intranet Pemerintah	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE	BPI	Ada	2 Dokumen Kebijakan	2 Dokumen Kebijakan
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Audit TIK	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan
	-	Pembentukan Tim Audit TIK Internal	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan
	-	Sosialisasi Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	BPI	Belum Ada	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi	
	-	Evaluasi dan Reviu Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	-	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	B	Kebijakan Layanan Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi				
	-	Pelaksanaan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi	BPI	Ada	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan
	-	Penyusunan Kebijakan Layanan Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi	BPI	Ada	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan
	-	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan Sosialisasi	1 Laporan Kegiatan Sosialisasi
	-	Reviu Kebijakan Layanan Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	C	Arsitektur SPBE				
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Keputusan Menteri	
	-	Pemantauan peta peran dan fungsi internal dan eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Penyelarasan proses bisnis lintas unit (internal) di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Penyelarasan Proses bisnis lintas unit (eksternal)	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Sosialisasi Arsitektur SPBE	BPI	Belum Ada	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi
	-	Evaluasi dan Reviu Dokumen Arsitektur SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	-	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Arsitektur SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi
	D	Peta Rencana SPBE				
	-	Pembuatan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Keputusan Menteri	
	-	Sosialisasi Peta Rencana SPBE	BPI	Belum Ada	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi
	-	Evaluasi dan Reviu Dokumen Peta Rencana SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	-	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Peta Rencana SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi
	E	Rencana dan Anggaran SPBE				
	-	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	BPI dan Setjen	Belum Ada	1 Dokumen Usulan Anggaran	1 Dokumen Usulan Anggaran

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Penetapan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	BPI dan Setjen	Belum Ada	1 Dokumen RKA	1 Dokumen RKA
	-	Pelaksanaan Sosialisasi dan Konsultasi Anggaran SPBE dengan Unit Kerja/Pengelola TIK	BPI	Belum Ada	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi	1 Laporan Dokumentasi Sosialisasi
	-	Evaluasi dan Reviu Dokumen Prosedur Penyusunan Anggaran SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	-	Evaluasi dan Reviu Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
	-	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi
	-	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Pembaruan Dokumen Prosedur Penyusunan Anggaran SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi	1 Dokumen Tindak Lanjut Evaluasi
2	Manajemen					
	A	Manajemen Risiko SPBE*				
	-	Updating Dokumen Matriks Peta Risiko SPBE	Ada	1 Dokumen Keputusan Menteri	1 Dokumen Keputusan Menteri	Ada
	-	Pelaksanaan RTP Manajemen Risiko SPBE	Belum Ada	1 Dokumen RTP	1 Dokumen RTP	Belum Ada

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	Belum Ada
	B	Manajemen Keamanan Informasi*				
	-	Pembuatan Dokumen Pedoman Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Belum Ada	1 Dokumen Keputusan Menteri		Belum Ada
	-	Penyusunan Standar Teknis dan SOP Keamanan SPBE	Belum Ada	1 Dokumen SOP	1 Dokumen SOP	Belum Ada
	-	Pelaksanaan Pengendalian Keamanan Informasi SPBE	Belum Ada	1 Laporan Pelaksanaan Pengendalian	1 Laporan Pelaksanaan Pengendalian	Belum Ada
	-	Evaluasi dan Reviu Penerapan Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	Belum Ada
	C	Manajemen Data*				
	-	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Data Berbasis Electronic Government Interoperability Frameworks (e-GIF)	Belum Ada		1 Dokumen Pedoman	Belum Ada
	-	Penyusunan Pengelolaan Manajemen data berupa pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk, Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data	Belum Ada	1 Dokumen Pengelolaa n	1 Dokumen Pengelola an	Belum Ada
	-	Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Data SPBE	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan	Belum Ada

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target		
				2022	2023	2024	
	D	Manajemen Aset TIK*					
	-	Penyusunan Dokumen Pedoman Manajemen Aset TIK	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Pedoman		
	-	Penyusunan Laporan Inventaris Aset TIK Seluruh Unit Kerja	BPI	Belum Ada	1 Laporan	1 Laporan	
	E	Kompetensi Sumber Daya Manusia**					
	-	Reviu Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Setjen	ada	1 Dokumen Reviu		
	-	Reviu Peta jabatan	Setjen	ada	1 Dokumen Reviu		
	-	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Setjen	belum ada	1 dokumen Keputusan Menteri		
	-	Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi SDM	Setjen	Belum Ada	1 Dokumen	1 Dokumen	
	-	Pengembangan Kompetensi SDM	BPSDM	ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan	
	-	Pembentukan CSIRT (Cyber Security Incident Response Team)	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Keputusan Menteri		
	F	Manajemen Pengetahuan*					
	-	Penyusunan Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Manajemen Pengetahuan		

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Penerapan Manajemen Pengetahuan	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan Penerapan	1 Dokumen Laporan Penerapan
	-	Evaluasi Penerapan Manajemen Pengetahuan	Itjen	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi
	G	Manajemen Perubahan*				
	-	Penyusunan Dokumen Manajemen Perubahan SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Manajemen Perubahan	
	-	Penerapan Manajemen Perubahan SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan Penerapan	1 Dokumen Laporan Penerapan
	-	Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan	Itjen	Ada	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi
	H	Manajemen Layanan SPBE*				
	-	Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Manajemen Layanan SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Perencanaan	
	-	Penyusunan dan Penetapan Pedoman Teknis Manajemen Layanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Petunjuk Teknis	
	-	Penyediaan dan Penerapan SLA/OLA pada Layanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Penerapan	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Penyusunan Rencana Kegiatan Manajemen Layanan	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Perencanaan	
	-	Penyediaan Platform Manajemen Layanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman, Kebijakan, dan Kegiatan Manajemen Layanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Sosialisasi	1 Dokumen Sosialisasi
	-	Evaluasi dan Reviu Pedoman dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu	1 Dokumen Evaluasi dan Reviu
3	Layanan					
	A	Penerapan Layanan Publik				
	-	Pengembangan Sistem Layanan Publik dan Eksternal Kemendes PDTT	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Pelaksanaan Integrasi Sistem Layanan Publik Aplikasi BUMDES Kemendesa PDTT dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait registrasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama Berbadan Hukum	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Pelaksanaan Integrasi Sistem Layanan Publik Aplikasi BUMDES Kemendesa PDTT dengan Aplikasi OSS BKPM terkait Nomor Induk Usaha bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	-	Pelaksanaan Integrasi Sistem Layanan Publik SIPEMANDU Kemendesa PDTT dengan Jaga KPK terkait Layanan Pengaduan	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
-		Sosialisasi Layanan Pendaftaran Badan Hukum untuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
		Sosialisasi Layanan Pendaftaran NIB untuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
		Pembuatan akun e-katalog sektoral	Setjen	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
-		Sosialisasi Layanan e-katalog LKPP bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama	Setjen	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
	B	Penerapan Layanan Administrasi Pemerintahan				
-		Pengembangan Sistem Layanan Internal Kemendesa PDTT	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
-		Pengembangan Layanan Portal Open Data	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
-		Pengembangan Layanan Single Sign On (SSO)	BPI	Belum Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
-		Pengembangan Layanan Api Gateway	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
-		Pengembangan Layanan Dashboard Kemendesa PDTT	BPI	Ada	1 Laporan Kegiatan	1 Laporan Kegiatan
4	Aplikasi					
	A	Aplikasi Khusus				
-		Pengembangan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM)	Ditjen PDP	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
-		Pengembangan Aplikasi SDGs Desa	BPI	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
-		Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Dana Desa (Monev DD)	Ditjen PDP	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Pengembangan Aplikasi Daily Report Pendamping (DRP)	BPSD M	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID)	BPI	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Aplikasi Bumdes	Ditjen PEID	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Aplikasi E-IPT	Ditjen PEID	Belum Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	Ditjen PPDT	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi SIPUKAT (Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi)	Ditjen PPKT RANS	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (SIBARDUKTRANS)	Ditjen PPKT RANS	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Pendidikan Transmigrasi (SIDITRANS)	Ditjen PPKT RANS	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi APBN KDPDTT (E-Monev)	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi E-Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP)	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah (SIMUH)	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi E-Kontrol/SITIKA	Itjen	Ada	1 Aplikasi	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Pengembangan Aplikasi Akademi Desa	BPSD M	Belum Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pelatihan Integratif Adaptif Responsif-Akuntabel Profesional Integritas Kebersamaan	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pembangunan Aplikasi Manajemen Aset TIK	BPI	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM)	Ditjen PDP	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Ditjen PEID	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi EHDW	Ditjen PDP	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Online Video Platform	BPSD M	Belum Ada	1 Aplikasi	
	B	Aplikasi Umum Layanan Publik				
	-	Pengembangan Aplikasi JDIH Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu (SIPEMANDU)	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	-	Pengembangan Aplikasi Whistleblowing System (WBS)	Itjen	Ada	1 Aplikasi	

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	C	Aplikasi Umum Administrasi Pemerintah				
	-	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)	Setjen	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Aplikasi E-Presensi	Setjen	Ada	1 Aplikasi	
	D	Aplikasi Publik				
	-	Pengembangan Website Portal Kemendesa PDTT	BPI	Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Website Portal Satu Data Desa PDTT	BPI	Belum Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
	-	Pengembangan Website Portal Spasial Desa PDTT	BPI	Belum Ada	1 Aplikasi	1 Aplikasi
5	Infrastruktur					
	A	Teknologi Informasi				
	-	Pemeliharaan dan Peningkatan Jaringan ISP (Internet Service Provider)	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pengembangan Layanan Media Penyimpanan Awan (Cloud Storage) Lumbung file	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pengembangan Layanan E-mail	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Server	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pemeliharaan dan Peningkatan Perangkat Keamanan Jaringan	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pemeliharaan Layanan Hosting dan Domain	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Pemeliharaan dan Revitalisasi Jaringan di Data Center dan Gedung	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pemeliharaan Data Center dan DRC (Disaster Recovery Center)	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	B	Pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN)				
	-	Koordinasi untuk Penggunaan PDN	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pemantauan dan peningkatan kinerja penggunaan layanan Pusat Data Nasional	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan Pemantauan	1 Dokumen Laporan Pemantauan
	C	Penyediaan kebutuhan lisensi software pendukung				
	-	Pengadaan kebutuhan lisensi software pendukung operasional dan keamanan	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
6	Keamanan					
	A	Keamanan Infrastruktur SPBE				
	-	Pelaksanaan Penilaian Kerentanan (Vulnerability Assessment) secara berkala	BPI			
	-	Pelaksanaan Penetration Test secara berkala	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Peningkatan kebutuhan penambahan hardware dan bandwitdh	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pengembangan Platform Keamanan Jaringan, Server dan Aplikasi	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan

No	Project/Activities		UIC	Baseline	Target	
				2022	2023	2024
	-	Kegiatan Edukasi tentang Keamanan SPBE	BPI	Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
7	Audit TIK					
	A	Audit Infrastruktur SPBE*	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Penyusunan SOP Audit Infrastruktur SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE Kemendesa PDTT				
	B	Audit Aplikasi SPBE*	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE Kemendesa PDTT	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Penyusunan SOP Audit Aplikasi SPBE				
	C	Audit Keamanan SPBE*	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Penyusunan SOP Audit Keamanan SPBE	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan
	-	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE Kemendesa PDTT	BPI	Belum Ada	1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan

BAB IV PENUTUP

Peta Rencana SPBE Kementerian ini disusun sebagai gambaran kegiatan pelaksanaan SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mencakup 7 (tujuh) muatan utama yaitu Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi SPBE.

Seluruh unit/sektor di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus mengacu pada Peta Rencana SPBE dalam penerapan SPBE untuk mencapai SPBE yang efisien, efektif, dan terpadu.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum



Rully Rachman